

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dalam tercapainya keadilan serta kemakmuran. Berbagai upaya dalam kegiatan pembangunan nasional bertujuan untuk pemerataan pembangunan bagi setiap daerah yang memiliki kelemahan dalam pendapatan. Pembangunan daerah yang ideal ialah pembangunan yang dibiayai melalui dana dari daerah itu sendiri. Alhasil, selain menunjukkan prinsip swadaya bagi masing-masing daerah, dana dari daerah sendiri dapat bertambah dari waktu ke waktu dan jumlahnya dapat dioptimalkan serta menciptakan keberlanjutan. Dalam upaya mewujudkan otonomi daerah yang telah diberlakukannya sejak tahun 2000 secara bertahap, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan segala kepentingan masyarakat berdasarkan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Ditetapkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 perihal Pemerintah Daerah, sebagai upaya menguatkan peranan diberlakukannya otonomi daerah dalam pembangunan daerah secara berkesinambungan.

Untuk mendorong berlangsungnya otonomi daerah yang optimum, maka diberlakukannya Desentralisasi fiskal yakni memiliki arti bahwa pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran (Prawirosetoto, 2006). Diberlakukannya Desentralisasi fiskal tersebut

yakni antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Diberlakukannya otonomi daerah yang diwenangkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi sebuah harapan agar pemerintah daerah dapat mengembangkan dan membangun daerahnya sendiri lebih leluasa karena pemerintah daerah bisa fokus dan lebih mengerti apa yang menjadi potensi daerah itu sendiri.

Dalam melaksanakan desentralisasi, sumber-sumber penerimaan daerah ymenurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 meliputi :

a. PAD atau Pendapatan Asli Daerah (*Local Government Revenue*)

Ialah penerimaan pendapatan dari berbagai sumber pada suatu daerah yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan daerah.

Berdasarkan UU. No. 33 Tahun 2004 pasal 3 bahwa Penerimaan Asli daerah bertujuan untuk mendanai otonom daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai wujud nyata dari diberlakukannya desentralisasi, maka dari itu semakin besar Penerimaan atau perolehan Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dikarenakan PAD ialah merupakan sumber pendanaan yang cukup berpengaruh untuk suatu daerah.

b. Dana Alokasi Umum

Dalam pelaksanaan desentralisasi, maka ditetapkan dana penerimaan yang berasal dari penerimaan APBN dalam upaya pemerataan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah, dana tersebut yakni Dana Alokasi Umum (Nordiawan, 2006).

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Ialah dana yang bersumber dari APBN yang dikhususkan pada suatu daerah tujuannya untuk memberi bantuan pada kegiatan daerah.

d. Dana Bagi Hasil

Dalam presentase tertentu suatu daerah akan diberikan dana dari APBN dalam membantu upaya pelaksanaan Desentralisasi dana tersebut yakni dana bagi hasil.

Berdasarkan dalam Undang-undang No tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan wewenang terhadap Pemerintah daerah untuk menjalankannya otonomi daerah serta mewujudkan kemandirian dalam mengurus daerahnya itu sendiri. Hal tersebut juga dijelaskan dalam ayat suci Al Quran pada Surah Al-Baqarah ayat 30, Surah An-Nisa' ayat 144 dan HR. Bukhori dan Muslim berkaitan dengan kepemimpinan dan kekuasaan.

يَاوَدُ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : *“(Ingat) ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, ‘Aku ingin menjadikan khalifah di bumi.’ Mereka bertanya, ‘Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Padahal, kami bertasbih memuji dan menyucikan nama-Mu.’ Dia berkata, ‘Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui,’”* (Surat Al-Baqarah ayat 30).

سُلْطٰنًا عَلٰیكُمْ لِيَّ تَجْعَلُوْا اَنْ اُتْرِيْدُوْنَ ؕ اَلْمُؤْمِنِيْنَ دُوْنَ مِنْ اَوْلِيَآءِ الْكٰفِرِيْنَ تَتَّخِذُوْا لَا اٰمَنُوْا اَلَّذِيْنَ يٰٓاَيُّهَا مُبِيْنًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?*(Surah An-Nisa' ayat 144)

الساعة فانتظر أهله غير إلى الأمر وسد إذا

“Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya”. (HR Bukhori dan Muslim).

Berdasarkan kedua ayat tersebut serta hadist diatas pada hakekatnya bahwa pemerintah dalam mengemban jabatannya harus memiliki tanggung jawab dan amanah dalam menjalankan pengelolaannya. Terkhusus untuk pengelolaan dalam keuangan, harus memiliki keahlian dan tanggung jawab yang sesuai agar mencapai hasil yang optimal serta mencapai kesejahteraan. Harapannya pemerintah dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin guna untuk mensejahterakan masyarakatnya demi kemakmuran. Pemerintah tidak memikirkan dirinya sendiri melainkan melakukan amanah dan tujuannya demi pengelolaan untuk kepentingan bersama terkhusus rakyatnya agar hidup makmur dan sejahtera.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan aspek yang harus ditingkatkan secara optimal, apabila suatu daerah penerimaannya semakin meningkat maka pemerintah daerah tidak bergantung lagi dengan pemerintah pusat, selain itu meningkatnya presentase pencapaian kontribusi PAD mencerminkan kemampuan dalam pengelolaan sehingga mencapai ekonomi yang baik. Namun apabila suatu daerah mengalami kesulitan dalam merealisasikan potensi daerah maka akan terjadi ketidakseimbangan ekonomi. Oleh sebab itu Pendapatan Asli Daerah sangat berperan dalam perkembangan otonom suatu daerah, semakin meningkatnya penerimaan PAD semakin besar pula daerah tersebut berkembang dan melakukan pembangunan daerah. Berikut ialah tabel Pendapatan Asli Daerah di D.I Yogyakarta.

Tabel 1. 1Pendapatan Asli Daerah Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2015-2020

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Trilliun Rupiah)
1	2015	1.518.860.030.656,77
2	2016	1.577.467.434.715,80
3	2017	1.711.618.168.817,33
4	2018	1.883.360.097.908,71
5	2019	2.082.795.334.434,50
6	2020	1.876.706.829.354,71

Sumber: Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta

Pendapatan Asli Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya meningkat, dapat dilihat pada Tabel 1.1 Peningkatan Penerimaan Asli Daerah mengalami peningkatan, akan tetapi pada Tahun 2020 mengalami penurunan, mungkin karena adanya Wabah Covid-19 ini maka pada tahun 2020 PAD mengalami penurunan, wabah ini berdampak pada segala aspek terutama pada ekonomi jelas saja pada penerimaan PAD tahun 2020 ini mengalami penurunan. Wabah Covid 19 ini mengakibatkan pada pendapatan sektor pariwisata berkurang, berkurangnya pendapatan pada sektor ekonomi, hal tersebut tentu saja mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, terlebih lagi adanya Pembatasan sosial berskala besar yang mengurangi aktivitas masyarakat. Namun terlihat pada tahun 2015-2019 terlihat bahwa Penerimaan Asli Daerah secara signifikan mengalami kenaikan, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 pemerintah tetap berupaya agar Penerimaan Pendapatan Asli Daerah normal kembali. Dengan adanya peningkatan penerimaan PAD tersebut maka setiap tahunnya perkembangan daerah pun semakin lebih baik. Dan menunjukkan adanya kemampuan kemandirian terlihat pada Penerimaan Asli Daerah setiap tahunnya.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ialah sebuah Provinsi yang cukup baik dalam mengembangkan fungsi dari Otonomi Daerah dan memiliki berbagai potensi terlihat dari penerimaan daerah yang menjadi aspek utama yang cukup besar dalam upaya pembangunan daerah. Dari hal tersebut dapat sebagai acuan arus yang baik bagi perekonomian terkhusus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut Tabel Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di DIY pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Pertumbuhan PAD di DIY

c	Tahun	Realisasi (Rp)	Persen
1	2015	1.518.860.030.656,77	
2	2016	1.577.467.434.715,80	3,86%
3	2017	1.711.618.168.817,33	8,50%
4	2018	1.883.360.097.908,71	10,03%
5	2019	2.082.795.334.434,50	10,59%
6	2020	1.876.706.829.354,71	-9,89%
		Rata-Rata Pertumbuhan	4,62%

Sumber : Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) DPRD Provinsi Yogyakarta

Berdasarkan tabel seperti yang tertera diatas bahwasanya rata-rata dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4,62%. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat pada tahun 2015 hingga tahun 2020 PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan secara bertahap namun sayangnya pada tahun 2020 PAD mengalami penurunan diakibatkan oleh adanya wabah virus corona. Memperhatikan per angka-an tabel tersebut di atas, bahwa

terjadi presentase penurunan dan peningkatan dalam penerimaan pada setiap tahunnya, maka diperlukannya ketetapan kebijakan dalam bidang peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD ialah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya pemungutan pajak kendaraan bermotor, pajak bea nama kendaraan bermotor serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
- b. Pemungutan dari pendapatan asli daerah itu sendiri terdiri atas pajak daerah, hasil perusahaan yang dimiliki daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan yang sah lainnya. (Suharsono, 2019)

Telah diketahui perihal pertumbuhan dari Pendapatan Asli Daerah, bahwasanya PAD bersumber mencakup beberapa aspek lainnya seperti halnya yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan yang dimiliki oleh daerah, pengelolaan yang dipisahkan serta Pendapatan Asli Daerah yang sah. Berikut kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 1. 3Kontribusi sumber penerimaan PAD (Juta Rupiah)

Jenis Pendapatan/Kind of Revenues	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.518.860	1.577.467	1.711.618	1.883.360	2.082.795	1.876.706
Pajak Daerah	1.347.894	1.358.294	1.477.730	1.615.270	1.773.940	1.646.559
Retribusi Daerah	43.088	43.088	39.887.	40.772	42.420	36.546
Hasil Perusahaan Milik Daerah	52.604	57.368	70.940	85.897	85.960	101.460

PAD yang Sah dan lain-lain	75.272	124.166	123.059	141.418	180.473	92.14
----------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	-------

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi D.I Yogyakarta

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwasanya penerimaan dari tahun ke tahun perihal pendapatan asli daerah semakin tahunnya semakin meningkat, itu berarti kontribusi penunjang penerimaan asli daerah juga ikut berkontribusi. Pada tahun 2015 hingga tahun 2020 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal tersebut sangat lah wajar dikarenakan kondisi suatu daerah juga dapat mengalami perubahan setiap tahunnya. Terlihat dari tabel diatas bahwa pajak daerah merupakan kontribusi penerimaan terbesar dibandingkan sumber lainnya, semakin tahun pendapatan penerimaan pajak daerah semakin meningkat. Itu artinya pajak daerah komponen sumber terbesar dari penerimaan pendapatan asli daerah. Sedangkan pada retribusi daerah mengalami kenaikan serta penurunan setiap tahunnya sama seperti halnya dengan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun sumber lain-lain PAD yang sah megalami peningkatan setiap tahunnya tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020. Dari beberapa sumber tersebut semua ikut berperan kontribusi dalam penerimaan asli daerah, oleh karena itu maka pemerintah daerah perlu untuk menggali potensi-potensi lebih dalam agar penerimaan pendapatan asli daerah semakin maksimal.

Pendapatan Asli Daerah setiap daerahnya berbeda-beda hal tersebut sesuai dengan potensi pada setiap daerahnya, Selain itu perlu adanya pengembangan potensi setiap daerahnya agar sumber-sumber baik dari pajak daerah, retribusi

daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain yang sah semakin meningkat dan mendorong meningkatnya pula pendapatan asli daerah.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dan pengalokasian Penerimaan keuangan daerah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pemerintah perlu menggali potensi dan keunggulan di daerah. Penerimaan PAD tidak terlepas dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi semakin meningkat pula perekonomian, sehingga memicu untuk melakukan pembangunan daerah demi kemaslahatan masyarakat daerah itu sendiri. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah diantaranya yakni Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah unit bisnis diantaranya Jumlah Usaha mikro kecil menengah, Jumlah Kendaraan bermotor dan Jumlah bangunan rumah.

Produk Domestik Regional Bruto ialah total nilai dari segenap output yang diperoleh dari suatu perekonomian pada daerah dengan periode waktu tertentu. (P.Todaro, 2002). PDRB mempengaruhi perolehan pada penerimaan daerah, PDRB bagian dari fungsi Pendapatan Asli Daerah. Berhasil atau tidaknya sebuah pengelolaan sumber daya baik itu ekonomi maupun pembangunan dapat dilihat dari besar atau minimnya total dari Produk Domestik Regional Bruto pada suatu daerah diterangkan oleh ahli ekonomi bahwa besarnya PDRB pada masing-masing daerah sangat bervariasi tergantung ada potensi suatu daerah (Sukirno, Makro ekonomi Teori Pengantar, 2016). Dengan meningkatnya penerimaan

PDRB Maka semakin meningkat pula pendapatan asli daerah yang digunakan dalam upaya pengelolaan dan pembangunan proyeksi-proyeksi pemerintah daerah baik dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun meningkatkan aspek sarana dan prasarana demi kelengkapan dan layaknya fasilitas masyarakat agar bisa meningkatkan daya produksi maupun kapaitas.

Pertumbuhan PDRB setiap tahunnya pada semakin meningkat, dimana hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa sektor yang menjadi indeks kontribusi PDRB.

Berikut merupakan pertumbuhan PDRB menurut kategori:

**Tabel 1. 4Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010
DIY berdasarkan kategori (dalam %)**

Kategori/Industri	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Kategori Pertanian, Perhutanan, dan Perikanan	2,11	1,46	1,93	2,56	1,02	4,19
Kategori Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,13	0,42	3,39	10,59	3,04	-8,84
Industri Pengolahan/Manufacturing	2,13	5,06	5,74	5,12	5,73	-4,38
Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	2,19	14,26	3,96	3,31	5,43	-1,38
Pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah, daur ulang	2,90	2,36	3,46	5,13	8,9	0,51
Kontruksi	4,24	5,42	7,01	13,1	14,38	-15,64
Perdagangan besar dan eceran, perbaikan mobil, dan sepeda motor	6,20	6,08	5,73	5,54	5,17	-4,52
Transportasi dan pergudangan	3,72	4,6	4,77	6,6	3,35	-20,21
Penyedia akomodasi mamin (makan serta minum)	5,77	5,51	6,21	6,80	9,00	-16,91
<i>Information dan communication</i>	5,12	8,32	6,14	6,48	7,45	19,7
Sektor Keuangan dan asuransi	8,27	4,99	5,92	5,51	6,77	-14,89
Real estate	6,05	5,13	4,91	5,54	5,93	1,27
sektor Perusahaan	7,32	3,50	6,00	5,52	6,76	-14,89
Sektor administarasi dalam	5,57	5,57	4,51	4,10	3,3	-2,22

pemerintahan, pertahanan serta jamsos (jaminan sosial)						
Kategori pada jasa Pendidikan	7,28	3,07	5,52	6,01	6,57	4,47
Kategori pada jasa Kesehatan	7,15	4,52	5,84	6,05	6,61	19,18
Jasa Lain-lain	8,00	5,7	5,76	6,19	6,25	-15,74
PDRB	4,95	5,05	5,26	6,20	6,59	-2,69

Sumber : BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan pada tabel laju pertumbuhan PDRB di DIY pada tahun 2015-2020 bahwa setiap tahunnya bertambah , namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis diakibatkan oleh wabah covid-19 yang berefek pada segala aspek perekonomian. Tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2019 mengalami pertumbuhan ekonomi mencapai 6,59 persen. Angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yakni sebesar 6,20% lebih tinggi pula dari tahun 2020, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis sehingga pdrb mampu mencapai titik -2,69 persen tumbuh lebih cepat dibandingkan dari tahun sebelumnya yakni tahun 2018 mencapai 13,10 persen.

Pada tahun 2018 hingga tahun 2019 pertumbuhan tertinggi dicapai dalam bidang sektor kontruksi. Pertumbuhannya mencapai 14,39 pada tahun 2019. Pencapaian pertumbuhan ekonomi satu diantaranya dikarenakan oelh adanya pembangunan infrastruktu, pembangunan jalan dan berbagai proyek lainnya. Apalagi pada tahun 2019 sedang dibangunnya bandara International Yogyakarta sehingga memicu untuk mengalami pertumbuhahn ekonomi. Selain itu, terdapat pertumbuhan ekonomi yang tumbuh poitif dengan kisaran 6 persen yakni dalam kategori jasa perusahaan mencapai 6,57%, pada jasa kesehatan sebesar 6,61 persen dan jasa pendidikan yakni 6,75%. Sedangkan 8 kategori lainnya tumbuh kurang dari 6 persen

Terlihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2020 semua bidang kategori turun tidak mengalami pertumbuhan, namun bidang aspek yang paling tinggi pada tahun 2020 yakni bidang jasa kesehatan. Tak lepas dari itu karena pada tahun 2020 seluruh penjuru dunia sedang diberi sebuah musibah yakni wabah covid-19, oleh karena itu merupakan PR bagi seluruh pemerintahan, masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan pertumbuhan ekonomi agar normal kembali dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Beberapa Aspek yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah selain PDRB yakni diantaranya Jumlah Unit Bisnis, Jumlah unit bisnis ini yakni usaha mikro kecil menengah dimana pada saat ini UMKM sangat berperan dalam peningkatan pendapatan perkapita pada sebuah daerah. Pada skala ekonomi dijelaskan bahwa UMKM merupakan aspek yang berkontribusi dalam meningkatkannya Produk Domestik Bruto, dimana semakin banyaknya UMKM pada suatu daerah maka berperan pada pendapatan perkapita, sehingga dapat meningkatkan PDRB selain itu juga dapat meningkatkan pajak daerah. Akhir-akhir ini UMKM didukung oleh pemerintahan, perizinan pembukaan UMKM juga dipermudah oleh pemerintahan dikarenakan aspek tersebut berperan positif dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1. 5 Total Jumlah UMKM di D.I Yogyakarta

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah UKM berdasarkan Skala Usaha (Unit)	229.974	238.619	248.217	259.581	262.130	287.682
Usaha Mikro	125.863	130.525	135.799	141.991	143.385	188.033
Usaha Kecil	57.412	59.655	62.042	64.896	65.533	58.980
Usaha Menengah	34.737	36.031	37.472	39.196	39.581	30.664
Usaha Besar	11.962	12.408	12.904	13.498	13.631	10.005

Sumber : Bappeda Provinsi D.I Yogyakarta

Berdasarkan tabel jumlah total Unit Mikro, Kecil dan Menengah pada provinsi DIY, bahwa setiap tahunnya jumlah umkm di Provinsi DIY semakin meningkat dari 6 tahun terakhir dari tahun 2015 hingga tahun 2020, jumlah umkm tertinggi yakni pada tahun 2020 dimana umkm mencapai jumlah 287.682.000. Meskipun Indonesia sedang diberi musibah adanya wabah covid hal tersebut malah membuat unit bisnis umkm semakin meningkat dengan jumlah yang cukup besar dari jumlah 261.2130.000 yakni tahun sebelumnya. Dalam tahun 2020 banyak masyarakat yang mmebuka usahanya memulai membangun umkm guna untuk mempertahankan ekonomi dikala panemi. Oleh karena dengan semakin meningkatnya dari tahun ketahun bahwa umkm semakin meningkat maka pemerintah pula memberikan kemudahan perizinan dalam penyelenggaraan pendirian umkm, hal tersebut tak hanya dilihat dari sisi pendapatan unruk daerah saja namun juga meningkatkan jumlah pendapatan perkapita masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehingga mencapai kesejahteraan, oleh karena itu semakin

banyaknya umkm baik dari sektor barang, jasa ataupun perdagangan lainnya merupakan upaya strategi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan taraf hidup sehingga mencapai kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kepentingan bersama.

Tak hanya PDRB, UMKM, Jumlah Kendaraan bermotor juga memiliki kontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dimana setiap tahunnya kendaraan bermotor baik roda dua ataupun jenis lainya baik kendaraan bermuatan, kendaraan umum dan kendaraan ber roda empat dari tahun ketahun semakin meningkat, oleh karena itu semakin meningkatnya jumlah Kendaraan semakin meningkat pula pendapatan pajak kendaraan bermotor, hal tersebut berbanding lurus dengan pendapatan Asli Daerah. Semakin meningkatnya Kendaraan maka penerimaan pajak daerah pada aspek Pajak Kendaraan Bermotor meningkat sehingga Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pun juga meningkat. Sama halnya dengan Jumlah Kendaraan, Jumlah bangunan Rumah pada tahun ke Tahun semakin meningkat, banyak lahan yang digunakan untuk tempat tinggal, oleh karena itu semakin banyaknya bangunan rumah semakin besar pula pendapatan Pajak Daerah yakni Pajak bumi dan bangunan, setiap rumah diwajibkan untuk membayarkan pajak bumi dan bangunan atau PBB-P2, oleh karena itu pajak daerah otomatis akan meningkat jika jumlah bangunan rumah semakin banyak. Pajak bumi dan bangunan merupakan hasil dari desentralisasi fiskal dan kebijakan otonomi daerah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini terdapat rujukan beberapa studi sebagai acuan dalam penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, Penanaman modal Asing atau PMA, Penanaman Modal dalam Negeri serta Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan dari penelitian tersebut bahwa secara simultan Variabel Produk Domestik Regional Bruto, Penanaman Modal Asing, dan Penanaman Modal dalam Negeri, serta Jumlah Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli, secara parsial bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variabel Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Hardiarto, 2021)

Penelitian yang berkaitan selanjutnya memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan mengetahui pengaruh UMKM terhadap PAD di Kabupaten Bengkulu, riset ini menggunakan analisis regresi berganda dengan jenis *sampling* yaitu purposive sample. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bengkulu. Sedangkan secara simultan kedua variabel yakni variabel pertumbuhan ekonomi dan usaha mikro kecil dan menengah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bengkulu. (Fatmawati, 2016)

Penelitian yang selanjutnya yakni memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Karesidenan Madiun. Penelitian ini menggunakan data sekunder,

teknik dalam pengumpulan menggunakan studi pustaka dan teknik analisa menggunakan metode ordinary least square. Hasil menunjukkan bahwa Produk domestik regional bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Karisedenan Madiun, Variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, Variabel Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Karisedenan Madiun. (Darmawan, 2017)

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah pengaruh jumlah dan kendaraan terhadap pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif menggunakan analisis regresi berganda. Hasil menunjukkan secara simultan bahwa Jumlah serta jenis kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan pajak kendaraan serta pendapatan asli daerah. (Natalia, 2017)

Alasan peneliti memilih untuk melakukan riset dengan memilih Seluruh Kabupaten/Kota yang terdapat di D.I Yogyakarta sebagai objek penelitian disebabkan karena Kabupaten/Kota di DIY memiliki potensi dalam pendapatan baik pajak daerah maupun sumber pendapatan lainnya seperti sumber daya alam yang beraneka ragam, seperti pada Variabel PDRB dimana PDRB terdiri atas bermacam-macam kategori sektor seperti pertanian, pertambangan, barang atau jasa, konstruksi dan lainnya dimana setiap kabupaten/kota di setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut. PDRB yang dihasilkan suatu daerah sangat bergantung pada sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut selain itu pada jumlah unit bisnis yakni umkm

dimana umkm disetiap daerah memiliki jumlah yang beraneka ragam dan beraneka jenis dari umkm itu sendiri. Sama halnya dengan jumlah kendaraan bermotor dan juga jumlah bangunan rumah dimana setiap masing-masing Kabupaten/Kota memiliki jenis kendaraan bermotor yang berbeda-beda seperti misalnya jika di Kota Yogyakarta karena merupakan pusat kota maka kendaraan Bermotor dengan segala jenisnya pasti lebih banyak dibandingkan dengan di daerah seperti Gunung Kidul, sama seperti jumlah bangunan rumah dimana telah diketahui bahwa di Kota Yogyakarta padat akan bangunan rumah dikarenakan dekat dengan perkotaan berbeda dengan daerah yang masih banyak lahan dan setiap daerahnya pasti berbeda-beda. Oleh karena itu PDRB, Jumlah unit bisnis, Jumlah kendaraan serta Jumlah bangunan rumah berpotensi untuk penggerak ekonomi sehingga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah baik melalui pajak daerah, ataupun Pendapatan lain-lain yang sah yang dapat mempengaruhi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah di D.I Yogyakarta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melaksanakan pembangunan daerah untuk mencapai kemakmuran.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka penulis melaksanakan sebuah penelitian dengan judul “ ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI D.I YOGYAKARTA (DIY) PADA TAHUN 2015-2020”

B. Batasan Masalah Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah, serta untuk memudahkan peneliti melakukan analisa maka penulis membatasi permasalahan agar peneliti lebih

fokus dan terarah. Dalam penelitian akan fokus pada faktor atau determinasi apa saja yang menentukan Pendapatan Asli Daerah dalam strategi mewujudkan tercapainya pembangunan daerah serta terwujudnya otonomi daerah yang mandiri khususnya di D.I Yogyakarta yakni perekonomian yang tumbuh dan maju sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki dapat dilihat melalui proporsi PDRB, jumlah Unit bisnis (UMKM), Jumlah Kendaraan serta Jumlah Bangunan Rumah terhadap Pendapatan Asli Daerah, Peneliti ini menggunakan studi kasus pada Kabupaten di D.I Yogyakarta yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo serta Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui pengaruh tersebut maka dilakukan analisa menggunakan aplikasi *evIEWS* dengan metode analisis data panel dan data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistika.

C. Rumusan Masalah

Sumber penerimaan daerah terbesar yakni dari Pendapatan Asli Daerah, pada otonomi Daerah kontribusi PAD cukuplah berperan, sehingga setiap kabupaten atau Kota berupaya untuk mengoptimalkan Penerimaan Asli Daerah selain itu juga berupaya mengali potensi agar meningkatnya pembangunan Daerah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan pada penelitian diatas maka dapat menjadi sebuah pernyataan bahwa:

1. Bagaimanakah pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta Pada tahun 2012-2020?
2. Bagaimanakah pengaruh Pertumbuhan Bisnis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta Pada tahun 2012-2020?
3. Bagaimanakah Pengaruh Pertumbuhan Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah istimewa Yogyakarta Pada tahun 2012-2020?
4. Bagaimanakah Pengaruh Pertumbuhan Property terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta Pada tahun 2012-2020?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut yakni

:

- a. Menganalisa Faktor-Faktor apa saja yang menentukan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi D.I Yogyakarta.
- b. Menganalisa Apakah PDRB mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di D.I Yogyakarta
- c. Menganalisa Apakah Jumlah Unit Bisnis (UMKM) mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di D.I Yogyakarta
- d. Menganalisa Apakah Jumlah Kendaraan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di D.I Yogyakarta
- e. Menganalisa Apakah Jumlah Bangunan Rumah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di D.I Yogyakarta

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan dalam penelitian diatas yakni :

- i. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun peneliian yang terkait yakni Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- ii. Bagi pemerintahan , penelitian diharapkan mampu menjadi tolak ukur dalam faktor yang mempengaruhi PAD sehingga pemerintah bisa lebih memperhatikan sumber penerimaan guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta melakukan pembangunan untuk kesejahteraan Masyarakat daerah.
- iii. Bagi Penulis, ditujukan untuk menyelesaikan tugas akhir akademik yang berguna dalam mendapatkan gelar Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.